

**SKRIPSI**

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI DALAM  
PENGEMBANGAN PALAWIJA DI DESA MATA ALLO  
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

**EMİYANTI B**

Nomor Stambuk : 105610497514



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI DALAM  
PENGEMBANGAN PALAWIJA DI DESA MATA ALLO  
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

EMİYANTI B

Nomor Stambuk : 105610497514

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani  
dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo  
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang


Nama Mahasiswa : Emiyanti B

Nomor Stambuk : 10561 04975 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

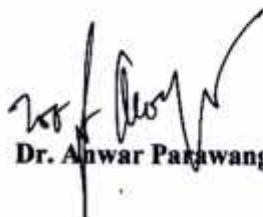
Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. H. Mappamiring, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Anwar Parawangi, M.Si**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Nasrul Haq, S.Sos., M.PA**

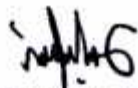
## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0007/FSP/A.3-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Februari tahun 2019.

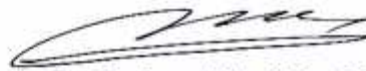
## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ( Ketua)
2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
3. Dr. Sudarmi, M.Si
4. Haerana, S.Sos, M.Pd



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Emiyanti B

Nomor Stambuk : 10561 0497514

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 13 Januari 2018

Yang menyatakan,

**EMIYANTI B**

## ABSTRAK

**EMİYANTI B.** *Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Mappamiring dan Anwar Parawangi).

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertanian di Desa Mata Allo dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada petani tentang pentingnya kelompok tani, serta pengadaan penyuluhan dan pendampingan yang kurang maksimal. Selain itu kurang berperannya pemerintah dalam pengurusan administrasi pengadaan depot pupuk di Desa Mata Allo, dan tidak adanya toko tani di desa Mata Allo. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling. Adapun teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan melalui bentuk kerjasama spontan, kerjasama langsung, dan kerjasama tradisional dijalin dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya hasil pertanian palawija dari tahun ketahun di Desa Mata Allo. Adapula faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama yaitu saling percaya, sarana dan prasarana yang cukup. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi dari beberapa kelompok tani.

Kata Kunci: kerjasama, pemerintah desa, kelompok tani

## KATA PENGANTAR

*‘Assalamua Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh’*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan InayahNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Secara khusus disampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Dahlini yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak bosan mendoakan, dan memotivasi, dan tak lupa ucapan terima kasih kepada lelaki hebat Jenli Bahtiar sebagai saudara kandung dan seluruh segenap keluarga besar Almarhum Pili dan Mariani beserta keluarga besar dari Almarhum Bancong dan Jamatia yang selalu menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara

teknisi maupun secara konsepsional dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

3. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Ibu Dr. Hj Ihyani Malik S. Sos., M.Si.
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif.
6. Sekretaris Dinas Pertanian Bapak Ir. Muhammad Arief, M.Si, Kepala Desa Mata Allo Bapak Syarifuddin dan keluarga serta seluruh informan yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian serta sangat membantu peneliti dalam hal pengumpulan data.
7. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Nurman, S.Pd, Masdin Dawan, S.Pd, dan Wahyu,SE selaku kakak dari penulis yang telah menjadi motivator dan memberikan saran dan dukungan kepada penulis baik dukungan moril dan dukungan material dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih teruntuk Erna, Zohra, Hendra, Muhammad Farid Yassir, Anggita Putri, Andi Sari Safitri, Muthmainna Ahmad, Maemuna, Ibnu Khaldun, Rasnawati, Fitrihandayani Jafar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



9. Teman-teman seperjuangan di Lembaga MASSAMPU(Mahasiswa Sosiologi Massenrempulu) dan teman-teman Ilmu Administrasi Negara 2014 terkhusus ADN kelas B sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberikan saran, dan motivasi kepada penulis dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.

Demikianlah ucapan terima kasih yang sempat penulis sampaikan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 13 Januari 2019

**EMİYANTI B**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Penerimaan Tim .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Kerjasama.....	7
B. Bentuk Kerjasama .....	9
C. Pemerintah Desa.....	13
D. Pelayanan Pemerintah Desa .....	14
E. Kerjasama Desa.....	14
F. Kelompok Tani.....	19
G. Kerangka Pikir .....	20
H. Fokus Penelitian .....	21
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan data.....	27

F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Bentuk Kerjasama Kelompok Tani dengan Pemerintah dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang ..	38
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang ....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

### Daftar Gambar

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 21
2. Gambar 4.1 Stuktur Pemerintahan Desa Mata Allo..... 36

## **DAFTAR TABEL**

### Daftar Tabel

1. Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Mata Allo dan Sekdesnya..... 32
2. Tabel 4.2 Nama Dusun dan Kepala Dusun ..... 32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan pada Pancasila, Undang Undang 1945 dan operasional serta berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan antara pemerintah, masyarakat, maupun swasta guna mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dapat mengelola dan menjalankan sistem administrasi dengan baik.

Administrasi negara dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang bekerjasama dalam lingkup kelembagaan birokrasi pemerintahan, dunia usaha masyarakat yang bertujuan tidak lain memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penyelenggaraan administrasi tidak difokuskan kepada lembaga pemerintah namun lebih kepada masyarakat yang dilayani. Hal ini bukan berarti administrasi tentang masyarakat akan tetapi administrasi yang diselenggarakan untuk masyarakat.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus membutuhkan manajemen pelayanan dari pemerintah menyangkut koordinasi, rencana, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan oleh pemerintah harus mencakup semua bidang, salah satunya yaitu pelayanan terhadap pembangunan sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju swasembada pangan untuk memberantas kemiskinan. Selain itu sektor pertanian juga yang memberi kontribusi terhadap pendapatan perekonomian suatu daerah. Perhatian terhadap pertanian semakin bertambah, hal ini karena pertanian menjadi salah satu sumber perekonomian dari suatu daerah. Selain itu pertanian akan selalu ada selama masyarakat membutuhkan makanan. Pertanian merupakan sumber pendapatan oleh kebanyakan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan pelayanan publik terhadap pembangunan sektor pertanian harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Selain hal tersebut, upaya untuk membangun sektor pertanian dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih dominan tinggal di pedesaan.

Menurut Widjaja (2005) Pembangunan di desa lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, masyarakat di desa memang sepatutnya yang lebih banyak menentukan pembangunan di desa sendiri.

Kerjasama pemerintah dengan kelompok tani sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa kelompok tani merupakan aset pemerintah dalam

rangka menuju pembangunan pertanian. Selain itu kelompok tani sebagai wadah atau tempat dilakukannya pelatihan atau penyuluhan. Sehingga kelompok tani sebagai tempat bekerjasama antar anggota memiliki peranan penting dalam kehidupan petani, karena semua kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilakukan oleh kelompok tani secara bersamaan.

Dalam upaya menuju pembangunan sektor pertanian sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran kelembagaan pertanian perlu didorong untuk memberikan kontribusi terhadap hal tersebut. Kelembagaan pertanian merupakan sebuah penggerak utama dalam mencapai pertanian yang lebih maju. Pemerintah dalam hal ini terkhusus pada Dinas pertanian, Badan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan (BP2K) dan kelompok tani menjadi kelembagaan pertanian yang memegang peranan penting karena merupakan lakon utama dalam pembangunan di sektor pertanian.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kabupaten Enrekang menjadi sentra penghasil tanaman Palawija terbesar di SulSel. Tanaman Palawija menjadi komoditi unggul di kabupaten Enrekang. Sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan para petani di kabupaten Enrekang dalam pembangunan sektor pertanian. Kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dapat melalui perhatian, kontribusi, dan peran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (3) strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui : pendidikan dan pelatihan, penyuluhan



dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi, dan penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan peraturan tersebut maka jelaslah bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pertanian.

Pertanian memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan perekonomian di kabupaten Enrekang. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Enrekang mengalami peningkatan 7,61% pada tahun 2017.(Tribun Enrekang-22 Januari 2018). Sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Enrekang. Dari tahun 2010 sampai tahun 2016 kontribusi sektor pertanian memiliki jumlah kontribusi paling tinggi dari usaha lainnya terhadap total PDRB. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang diandalkan oleh penduduk kabupaten Enrekang yang tersebar di 96 desa.

Desa Mata Allo merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian palawija. Sebagian masyarakatnya tergabung dalam kelompok tani namun adapula yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Jumlah kelompok tani yaitu sembilan kelompok tani dengan nama masing-masing kelompok tani Sinar Buntu Kurung, kelompok tani Tunas Muda, kelompok tani Buntu Bunu', kelompok tani Pantilang, kelompok tani KWT.Sinar Buntu Kurung, kelompok tani Buangin. kelompok tani Salu Bendo, dan kelompok tani Mubarak. kelompok tani Mata Wai Cambae. Melihat potensi yang ada di Desa Mata Allo, maka pembangunan di bidang pertanian palawija merupakan salah satu yang

harus menjadi perhatian pemerintah. Namun perhatian pemerintah sangat minim terhadap kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo. Hal demikian dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada petani tentang pentingnya kelompok tani, serta pengadaan penyuluhan dan pendampingan yang kurang maksimal. Selain itu kurang berperannya pemerintah dalam pengurusan administrasi pengadaan depot pupuk di Desa Mata Allo, dan tidak adanya toko tani di desa Mata Allo.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dan kelompok tani mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dan para kelompok tani, pembelajaran dan pertimbangan dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kerjasama**

Menurut Ramses dan Bowo (Tjahjanulin Domai 2011:37) kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dengan cara dinamis dalam mencapai suatu tujuan bersama. Secara teoritis, istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scale*). Pembelanjaan atau pembelian bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau lebih “*threshold points*” akan lebih menguntungkan daripada skala kecil. Melalui kerjasama tersebut biaya *overhead* (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala kecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberkan hasil yang memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dan sebagainya”.

Anjuwaningsih (2006) menerapkan bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Kerjasama bisa bermacam-macam bentuknya, namun semua kegiatan yang

dilakukan diarahkan guna mewujudkan tujuan bersama. Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama-sama.

Bungin, (2011) kerjasama (*cooperation*) adalah usaha bersama antar perorangan atau kelompok guna mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Bowo dan Andi dalam Saldiatul (2007:50-51) Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (*win-win*). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama. Saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerjasama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing.

Kaswan, (2013) *Cooperation* atau kerjasama berarti “rencana sukarela di mana dua atau tiga entitas atau orang terlibat di dalam pertukaran yang

saling menguntungkan sebagai pengganti berkompetisi.” Dalam istilah sederhana, Kerjasama memadukan ciri-ciri koordinasi dengan berbagai sumber daya. Menurut Thomson dan Perry dalam (Muh Caesar Kurniaji, 2016) kerjasama memiliki derajat yang berbeda mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan *Collaboration* pada tingkat yang paling tinggi.

Kerjasama memahamkan untuk menggambarkan sebagai bentuk interaksi sosial, atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dijumpai semua kelompok manusia (Setiadi, 2006).

Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (Sumarni:2016) Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada waktu yang sama memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai satu tujuann bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika suatu unsur tersebut tidaka termuat dalam satu objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada objek itu tidak terdapat kerjasama.

Unsur dua pihak selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Zainuddin (2009) kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

## **B. Bentuk kerjasama**

Rosen (Domai 2011:41) kerjasama dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan.

Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) : dibedakan atas:

1. *Handshake agreements*, adalah pengaturan kerjasama yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis;
2. *Written agreement*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk “*handshake agreement*” merupakan bentuk yang dominan melahirkan konflik dan kesalahpahaman (*misunderstanding*), sementara *written agreement* dibutuhkan guna melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama. Hal-hal yang harus disampaikan dalam perjanjian tertulis ini yaitu kondisi untuk melakukan kerjasama serta penarikan diri, sharing biaya, lokasi, pemeliharaan, skedul, operasi dan aturan kepemilikan sumberdaya bersama, kondisi sewa dan cara pemecahan konflik.

Disisi lain menurut Rosen (Domai, 2011) dalam pengaturan kerjasama (*farms of cooperation Arrangements*) terdiri atas beberapa bentuk yaitu :

1. *Constantia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam berbagi sumberdaya , karena sangat mahal apabila ditanggung sendiri-sendiri.
2. *Joint Purchasing*, yaitu cara kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menghemat biaya karena skala pembelian lebih besar.
3. *Equipment Sharing*, yaitu penataan kerjasama dalam berbagi peralatan yang mahal, atau yang jarang digunakan.
4. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam membuat bangunan.
5. *Joint Services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam pelayanan publik.
6. *Contract Service*, yaitu penataan kerjasama dimana kelompok yang satu mengontrak pihak yang lain guna memberikan pelayanan tertentu.

Bungin, (2011) mengemukakan beberapa bentuk kerjasama:

1. Gotong royong dan kerja bakti



Gotong royong yaitu sebuah proses kerjasama yang terjadi di pedesaan, dimana proses ini menghasilkan kegiatan saling tolong menolong, pertukaran tenaga dan barang maupun pertukaran emosional dalam bentuk timbal balik di antara mereka. Baik yang terjadi di sektor keluarga maupun di sektor produktif.

2. *Bargaining*

*Bargaining* adalah proses kerja sama dalam bentuk perjanjian pertukaran kepentingan, kekuasaan, barang-barang maupun jasa antara dua organisasi atau lebih yang terjadi di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum, maupun militer.

3. *Co-optation*

*Co-optation* adalah proses kerjasama yang terjadi diantara satu orang dan kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi atau Negara dimana terjadi proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menciptakan stabilitas.

4. *Coalition*

Yaitu, beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang sama kemudian melakukan kerjasama, untuk mencapai tujuan tersebut. *Coalition* umumnya tidak menyebabkan ketidakstabilan struktur dimasing-masing organisasi, karena *coalition* biasanya terjadi di unit program dan dukungan politis.

5. *Joint-venture*

Yaitu, beberapa organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu.

Menurut Soekanto (2012), dari pandangan sosiologis, pelaksanaan kerja sama antar kelompok masyarakat dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bargaining* yaitu kerja sama antara individu dan atau antar kelompok untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dengan suatu keepakatan saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
- b. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela mengambil unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi untuk menjadi salah satu cara menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
- c. *Coalition* yaitu kerja sama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang searah. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batasan tertentu dalam kegiatan kerja sama sehingga identitas dari masing-masing organisasi yang berkoalisi tidak hilang.

Gillin dan Gillin, (Sofiyana:2013) Dalam teori sosiologi dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama diantaranya:

1. kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*): kerjasama yang dilakukan sertamerta, dalam artian pelaksanaan kerjasama dilakukan antara dua orang atau lebih dimana pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.
2. kerjasama langsung (*directed cooperation*): kerjasama yang dilakukan atas perintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerjasama langsung sebagai

reaksi dari adanya perintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.

3. kerjasama kontrak (*contractual cooperation*): kerjasama atas dasar tertentu. Pelaksanaan kerjasama kontrak dilaksanakan karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak dalam melakukan kerjasama, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan kerjasama kontrak mewajibkan pihak yang bekerjasama harus melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
4. kerjasama tradisional (*traditional cooperation*): kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Pelaksanaan kerjasama tradisional dilaksanakan dengan cara tradisional, bisa dilaksanakan dengan melakukan barter, gotongroyong dan kerjabakti.

### **C. Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nurcholis, (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
- 3) Unsur kewilyahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

#### **D. Pelayanan Pemerintahan Desa**

Nurcholis (2011) Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas beberapa pelayanan seperti pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pelaksanaan pelayanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelayanan publik berkaitan dengan yang masuk dalam kategori sektor publik, tidak termasuk sektor privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, ikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

Pelayanan pembangunan adalah adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan wara desa baik langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa.

## **E. Kerjasama Desa**

Nurcholis, (2011) Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kerjasama desa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Kerjasama desa harus mengedepankan kepentingan dan aspirasi yang lahir dalam masyarakat.

Nurcholis, (2011) Ruang lingkup kerjasama antardesa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama meliputi bidang:

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Sosial budaya
- e. Ketentraman dan ketertiban
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam satu provinsi mengadakan kerjasama, ketentuan kerjasama antardaerah harus diikuti. Disamping kerjasama dengan desa-desa disekelilingnya, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu semua pihak diluar pemerintah desa baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan yang sesuai dengan objek

yang dikerjasamakan. Tujuan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kerjasama yang dilakukan antar desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan di dalam bidang :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Sosial budaya
- e. Ketenteraman dan ketertiban
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- g. Tenaga kerja
- h. Pekerjaan umum
- i. Batas desa, dan
- j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Kerjasama antardesa ditetapkan dengan keputusan bersama. Adapun kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama. Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama antara lain memuat: (Nurcholis, 2011)

- a. Ruang lingkup kerjasama
- b. Bidang kerjasama
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
- d. Jangka waktu

- e. Hak dan kewajiban
- f. Pembiayaan
- g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan
- h. Penyelesaian perselisihan
- i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan

Nurcholis, (2011) Pembentukan badan kerja sama desa adalah dengan keputusan bersama. Mekanisme dan tata kerja sama desa ditetapkan dengan peraturan desa. Pembahasan rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Pembahasan tentang rencana kerjasama desa meliputi :

- a. Ruang lingkup kerjasama
- b. Bidang kerjasama
- c. Tata cara dan ketetapan pelaksanaan kerjasama
- d. Jangka waktu
- e. Hak dan kewajiban
- f. Pembiayaan
- g. Penyelesaian perselisihan
- h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa perlu dibentuk pengurus badan kerjasama desa. Pengurus badan kerjasama desa terdiri atas unsur :

- a. Pemerintahan desa
- b. Anggota badan permusyawaratan desa
- c. Lembaga kemasyarakatan

- d. Lembaga lainnya yang ada di desa
- e. Tokoh masyarakat

Hasil dari kesepakatan pembahasan kerjasama desa ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa. Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa. Perubahan kerjasama desa bisa dilakukan apabila:

- a. Terjadi situasi *force manager*
- b. Atas permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi badan permusyawaratan desa
- d. Kerjasama desa telah habis masanya.

Pembatalan kerjasama desa bisa dilakukan dengan alasan:

- a. Adanya pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak
- b. Kerjasama desa bertolakbelakang dengan ketentuan diatas
- c. Merugikan kepentingan masyarakat

Setiap perselisihan yang lahir dalam kerjasama desa wajib diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Perselisihan kerjasama desa dalam suatu kecamatan difasilitasi dan di selesaikan oleh camat. Perselisihan kerjasama desa yang berbeda kecamatan dalam satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota. Perselisihan kerjasama desa yang berbeda kabupaten/kota pada satu provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh gubernur.



Kepala desa selalu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif. Kepala desa harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat desa melalui BPD.

#### **F. Kelompok Tani**

Jenudin, (2017) Kelompok Tani adalah kumpulan para petani yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial , ekonomi, sumberdaya), keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.

Departemen Pertanian (Deptan) memberikan definisi Kelompok Tani adalah wadah sebagai tempat atau forum dari sekumpulan petani yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu kawasan atau hamparan yang sama dan terorganisir satu sama lain secara musyawarah dan mufakat.

Menurut Mardikanto, (Matanari:2016) mengartikan kelompok tani sebagai kumpulan orang orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa(pria/wanita)maupun petani-taruna yang terkait secara formal dalam suatu kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta benda di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Sumilat, (2017) Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani di pedesaan yang saling mengenal akrab dan saling percaya antara anggota kelompok tani, mempunyai pandangan yang searah dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani.

## **G. Kerangka Fikir**

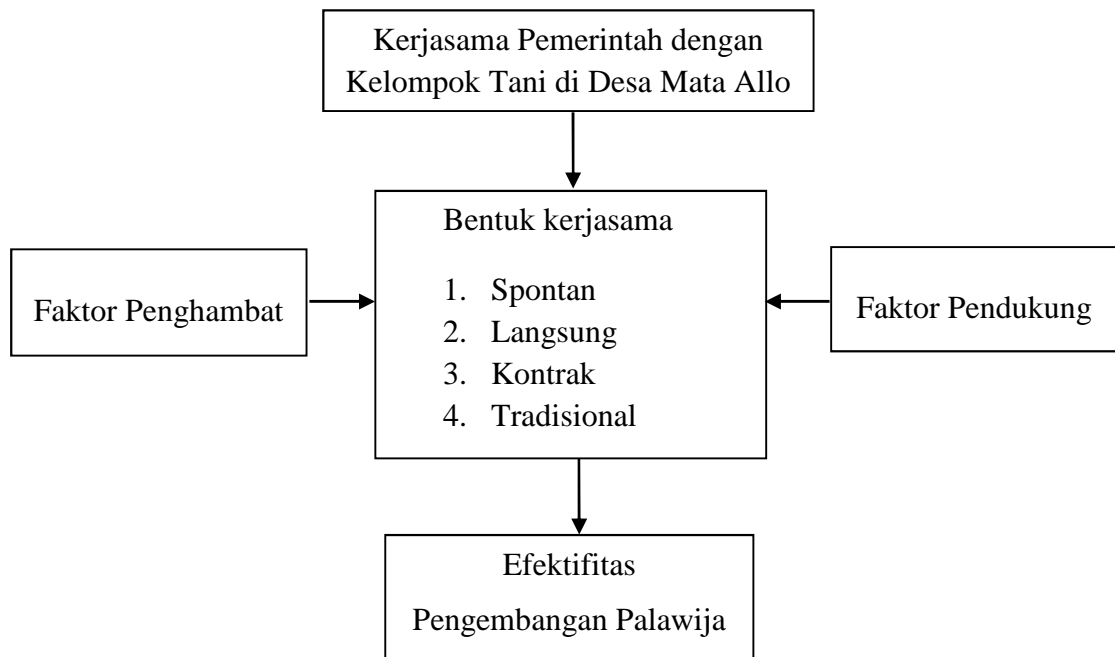
Pada setiap penelitian selalu menggunakan kerangka pikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan pembahasan tidak terarah.

Sumantri, (Sugiono) berpandangan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran ini merupakan pemaparan yang bersifat sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Pengembangan palawija yang ada di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan palawija. Bukan hanya pemerintah, namun masyarakat petani juga sangat berperan penting dalam pengembangan palawija.

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan kelompok tani di Desa Mata Allo. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bentuk-bentuk kerjasama menurut Gillin dan Gillin. Adapun bentuk kerjasama menurut Gillin yaitu 1.) kerjasama spontan, 2.) kerjasama langsung 3.) kerjasama kontrak dan 4.) kerjasama tradisional. Hasil dari suatu kerjasama dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor pendukung atau faktor penghambat, dan penerapan bentuk kerjasama yang digunakan. Untuk mempermudah memahami arah

pembahasan dari penelitian ini, maka penulis memberikan uraian yang menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## H. Fokus Penelitian

1. Bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

## I. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Kerjasama spontan yaitu kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dilakukan secara sertamerta, dalam artian kerjasama yang terjalin tanpa adanya perintah dari siapapun.
3. Kerjasama langsung yaitu kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dilakukan berdasarkan perintah atasan.
4. Kerjasama kontrak yaitu kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dilakukan atas dasar tertentu. Pelaksanaan kerjasama atas dasar perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Dimana ada sanksi yang diterima ketika ada yang melanggar kontrak yang telah disepakati.
5. Kerjasama tradisional yaitu kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial.
6. Faktor pendukung yaitu faktor yang mempermudah kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

7. Faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember Tahun 2018 yaitu dua bulan setelah seminar proposal yang dimana objek penelitian dilaksanakan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Adapun alasan peneliti memilih objek tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang serta faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini akan memberikan pemaparan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Bogdan dan Taylor (Suwardi: 2008) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang melahirkan data deskriptif dalam bentuk kalimat atau lisan dari beberapa orang dan pelaku yang diamati.

2. Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel bahkan lebih (independen) tanpa adanya perbandingan, atau mengkaitkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

### **C. Sumber Data**

Ulum (2016) mengatakan bahwa sumber data merupakan asal darimana Anda memperoleh data-data. Adapun sumber data yang akan dipeakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi langsung. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang serta data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa laporan atau beberapa dokumen dalam bentuk informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian yang bisa dilihat langsung dalam bentuk tulisan. Adapun laporan atau dokumen dalam bentuk informasi tertulis yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data dari jurnal, buku, majallah dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berhubungan dengan pembangunan pertanian dari melalui proses kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo.

#### D. Informan Penelitian

Menurut Bungin (2011) informan adalah orang yang diwawancarai untuk dimintai informasi oleh peneliti. Informan adalah orang yang dianggap mampu menguasai dan benar-benar memahami keterangan data, informasi ataupun kebenaran dari suatu objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja informan yang akan dimintai informasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Ir. Muhammad Arief, M.Si	Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Enrekang	MH	1 orang
2	Nurlaela, SP	Penyuluh Pertanian	NL	1 orang
3	Syarifuddin	Kepala Desa Mata Allo	SY	1 orang
4	Bahtiar, Geri, Usman Rasi, dan Baharuddin	Pengurus Kelompok Tani	BT, GR, UR, BA	4 orang
5	Mariani	Masyarakat Petani Lainnya	MA	1 orang
<b>Jumlah</b>				8 orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:



## 1. Teknik observasi

Hadi, dalam(Sugiono: 2013), mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang luas, proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di Desa Mata Allo yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung terhadap aktifitas kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo.

## 2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan dari beberapa data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan aktifitas kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang.

Menurut Bungin (2015), Wawancara adalah proses dialog dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan,dan lainnya yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara (*interviewer*)yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai(*interviewee*) yang memberikan jawaban.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan dokumen-dokumen yang disertai dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/penulis, buku, dan Undang-Undang ataupun artikel-artikel yang mendukung keaslian data atau dokumen.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut McDrury (Moleong, 2014) mengatakan bahwa analisis data yang dapat dipakai dalam penelitian dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti mengumpulkan segala bentuk informasi dan data yang kemudian dirangkum dan dipilihlah hal-hal yang pokok dari data, lebih fokus pada hal-hal yang lebih diperlukan, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi membantu untuk melihat gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai kerjasama pemerintah dan kelompok tani dalam pengembangan palawija.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal tersebut peneliti berusaha untuk menguraikan

secara singkat tentang bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif bisa berupa penjelasan atau keterangan suatu objek dalam hal ini mengenai pola kerjasama pemerintah dengan kelompok tani yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **G. Pengabsahan Data**

Menurut Lofland (Moleong, 2014) Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat diperoleh dengan langkah mengumpulkan data dengan cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kebutuhan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat keabsahan suatu informasi yang didapat dari sumber yang berbeda. Misalnya melakukan perbandingan antara hasil observasi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, melakukan perbandingan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratannya.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan langsung yang harus sering dilakukan dan tidak hanya sekali melakukan pengamatan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa**

Pada dasarnya Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang adalah merupakan desa induk atas beberapa desa pemekaran yang ada, seperti Desa Taulo, Desa Bolang, sebagian Desa Sumillan. Setelah Kalosi dimekarkan menjadi kelurahan dan nama Desa Mata Allo tidak boleh dihilangkan maka desa Mata Allo tetap menjadi nama desa yang meliputi dusun To'Cemba, To'Enduk, dan To'Collo.

Menurut sejarah bahwa nama Desa Mata Allo itu diambil dari sebuah tempat yang ada di Desa Bolang, dimana di tempat itu kita dapat melihat matahari terbit di waktu pagi secara langsung. Sedangkan Mata Allo sendiri artinya matahari. Setelah 3(tiga) dusun yang ada dalam wilayah Desa Mata Allo sudah dimekarkan, yaitu Dusun Bolang, Dusun Taulo dan Dusun Dedekan untuk menjadi sebuah desa maka tinggal Kalosi dan Dusun To'Cemba yang berada dalam wilayah Desa Mata Allo.

Setelah Kalosi menjadi sebuah Kelurahan maka nama Desa Mata Allo itu di alihkan ke To'Cemba dan sampai sekarang menjadi sebuah desa definitif sejak tahun 1997, sejak tahun itu nama Desa Mata Allo berada di To'Cemba, To'Enduk dan To'Collo.

Adapun nama-nama yang pernah memimpin Desa Mata Allo setelah berpisah dengan Kalosi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Mata Allo dan Sekdesnya

No	Periode	Nama Kepala Desa	Nama Sekretaris Desa
1	1997-1999	Bakhtiar	Syamsir
2	1999-2005	Syamsir	Syarifuddin
3	2005-2006	Muskamal	Syarifuddin
4	2006-2012	Syamsir	Syarifuddin
5	2012-sekarang	Sudarmin Tahir	Syarifuddin

Sumber : Rencana Program Jangka Menengah Desa Mata Allo Kec.Alla  
Kab Enrekang

Adapun tabel nama-nama dusun yang ada dalam wilayah desa Mata Allo adalah:

Tabel 4.2 Nama Dusun dan Kepala Dusun

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1	To'Cemba	Muhammad Ruslan
2	To'Enduk	Abdul Wakka
3	To'Collo	Bawa'

Sumber : Rencana Program Jangka Menengah Desa Mata Allo Kec.Alla  
Kab Enrekang

Kemudian nama-nama lembaga yang ada di Desa Mata Allo adalah sebagai berikut :

1. BPD
2. LKSMD
3. Karang Taruna
4. Kelompok Gapoktan
5. Kelompok Tani
6. Remaja Masjid
7. Kader Posyandu

## 2. Visi dan Misi Desa Mata Allo

### a. Visi

Visi adalah sebagai pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Mata Allo adalah:

“Terwujudnya Desa Mata Allo Yang Makmur, Aman. Tertib, Indah, Berakhlakul Kharimah Yang Kreatif dan Inovatif”

Mengembangkan dan membangkitkan semangat Desa Mata Allo Yang berakhlak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan menuju masyarakat adil dan makmur yang kreatif dan inovatif

### b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Pernyataan misi biasanya ringkas dan pernyataan sederhana. Misi yang tepat berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa . Adapun yang menjadi misi pemerintah Desa Mata Allo untuk mencapai visi yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang teratur, terkoordinir dan berstandar.

2. Terwujudnya masyarakat yang agamis berdasarkan nilai-nilai agamayang dianut
3. Meningkatkan jumlah pendapatan Asli Desa dan mengelolanya secara transparan, jujur dan proporsional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, demokratis, adil, transparansi, dan akuntabel.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonmi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat
6. Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerjasama dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta memberi perhatian utama pda kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana prasarana umum
9. Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, baik material maupun spritual
10. Meningkatkan tingkat kualitas hidup manusia secara sehat jasmani dan rohani
11. Terwujudnya budaya gotong-royong dan kebersamaan dalam pembangunan di segala bidang.



### **3. Letak Geografi dan Demografi Desa Mata Allo**

#### **a. Geografis**

Desa Mata Allo terletak +/-42 km dari Ibukota Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 415 Ha. Adapun batas wilayah Desa sebagai berikut :

1. Utara : Desa Sumillan Kec. Alla
2. Selatan : Desa Salu Dewata Kec. Anggeraja
3. Barat : Desa Batu Ke'de Kec. Masalle
4. Timur : Kel. Kalosi Kec. Alla

#### **b. Iklim**

Keadaan iklim Desa Mata Allo terdiri dari tiga musim yaitu, musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai bulan April, musim kemarau antarabulan Juli sampai bulan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai bulan Juni.

#### **c. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan**

Desa Mata Allo berjumlah 1348 penduduk, dengan perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 690 penduduk dan jumlah perempuan sebanyak 658 penduduk ,dengan jumlah KK 321 KK. Adapun mata pencaharian dari penduduk yaitu petani sebanyak 369 orang , pedagang 11 orang, tukang kayu 10 orang, tukang batu 11 orang, penjahit 3 orang, PNS 12 orang, pensiunan 12 orang, perangkat desa 8 orang. Adapun tingkat pendidikan dari penduduk Desa Mata Allo yaitu , 169 orang tidak

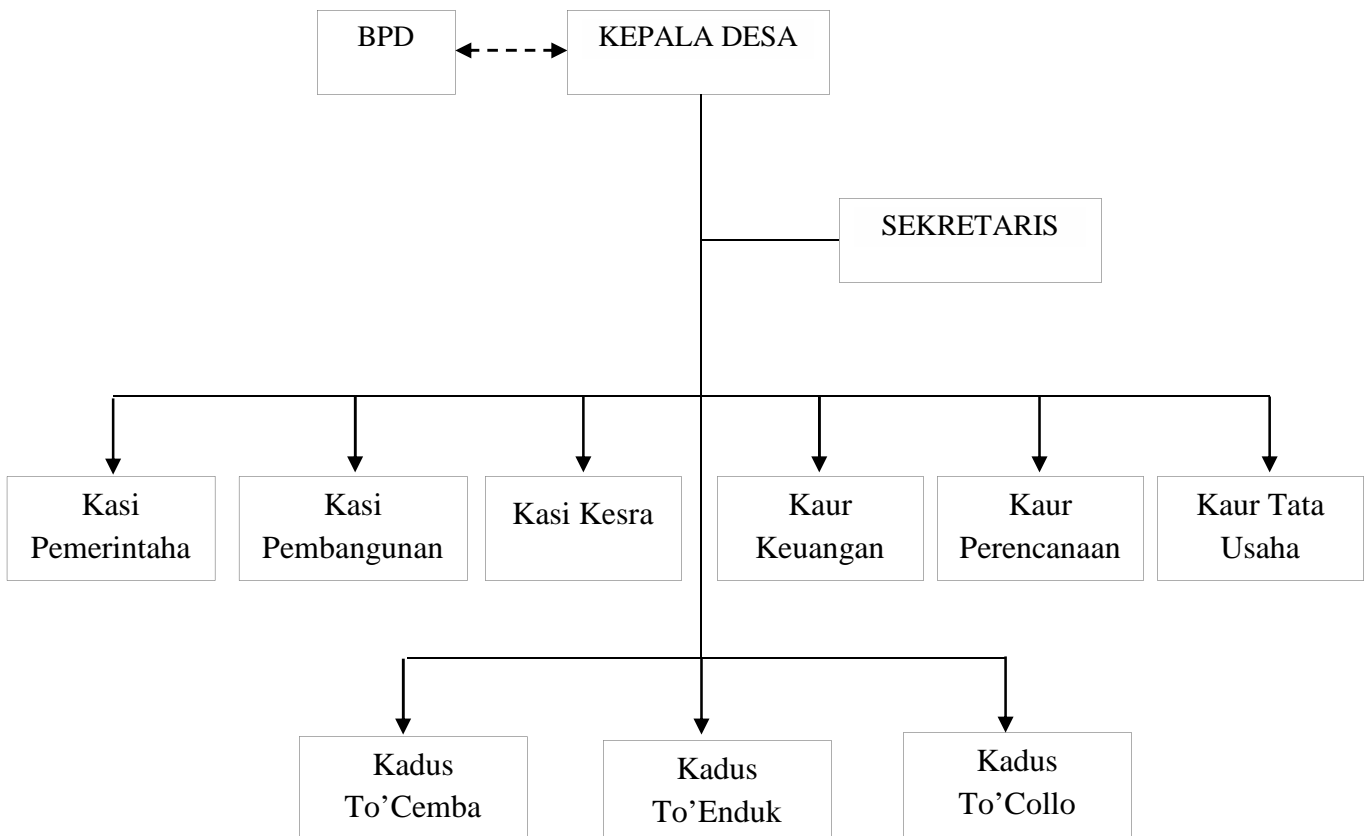
tamat SD, 465 orang SD, 350 orang SLTP, 309 orang SLTA, 55 orang Diploma/Sarjana.

#### d. Pemerintahan

Secara administratif Desa Mata Allo meliputi tiga dusun antara lain 1). Dusun To'Cemba, 2). Dusun To'Enduk, 3). Dusun To'Collo. Di desa Mata Allo terdapat 1 gedung SD(SDN 90 To'Cemba), 1 gedung TK/PAUD, 1 poskesdes, 3 masjid, 5 poskamling

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### MATA ALLO



Gambar 4.2. Stuktur Pemerintahan Desa Mata Allo

## **B. Bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang**

Kerjasama merupakan usaha bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan kerjasama dilakukan dengan maksud mempermudah pelaksanaan sesuatu kegiatan dan pencapaian tujuan dengan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak yang bekerjasama. Untuk mengindikasikan bagaimana kerjasama pemerintah dengan kelompok tani peneliti akan mendeskripsikan beberapa indikator dari bentuk kerjasama yakni meliputi: 1). Kerjasama spontan, 2). Kerjasama langsung, 3). Kerjasama kontrak, 4). Kerjasama tradisional.

### **1. Kerjasama Spontan**

Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*) adalah kerjasama yang dilakukan sertamerta. Artinya, kerjasama dilakukan tanpa adanya perintah dari siapapun, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak kelompok tani.

Dari hasil wawancara berikut dapat kita ketahui bagaimana kerjasama spontan pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo. Berikut hasil wawancara dengan MH selaku sekretaris di Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.

“...yang saya ketahui para penyuluh yang sudah kita tugaskan dimasing masing tempat, mereka bisa ke kebun para petani ketika waktu luang meskipun tanpa adanya perintah dari kita, hanya sekedar melihat bagaimana keberhasilan pertanian mereka dan apa yang menjadi masalah mereka dan para penyuluh bisa secara langsung memberikan pengetahuan pada waktu itu juga”. (hasil wawancara dengan MH 06 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama spontan yang sering dilakukan antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu pemberian penyuluhan secara langsung kepada petani meskipun tanpa ada perintah dari dinas pertanian. dengan kata lain para penyuluh hanya sekedar mengunjungi lokasi pertanian dan ketika ada masalah yang dihadapi para petani maka diberikanlah penyuluhan secara langsung pada waktu itu juga dan dilokasi dimana ada petani yang mengeluh.

Keterangan di atas didukung oleh pernyataan NL selaku petugas penyuluh pertanian di Desa Mata Allo ;

“...iya sering, kita sering bertemu dengan petani ketika kita masuk ke Desa Mata Allo meskipun tanpa ada perintah dari bawah untuk melakukan penyuluhan, kita juga sering cerita-cerita tentang perkembangan dari hasil pertanian mereka dan apa masalahnya, kita juga memberikan arahan tentang apa yang harus mereka lakukan ketika ada masalah yang di hadapi tentunya solusi yang sesuai dengan masalah mereka dalam bertani”.(hasil wawancara dengan NL 01 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan NL dapat diketahui bahwa meskipun tanpa adanya perintah dari dinas untuk melakukan penyuluhan dan tidak adanya panggilan dari para kelompok tani untuk diberikan penyuluhan, para penyuluh bisa masuk lokasi desa Mata Allo hanya sekedar melihat bagaimana perkembangan dan apa masalah yang dihadapi kelompok tani. Pada saat yang sama petani bisa diberikan penyuluhan langsung dilokasi dimana antara petani dan penyuluh bertemu secara kebetulan dan saling sharing masalah dan solusi dalam menghadapi pertanian menuju lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan SY selaku Kepala Desa di Desa Mata Allo ;

“...cukup sederhana, beberapa petani sering bertemu secara kebetulan di kebun mereka oleh para penyuluh tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya bahwa akan ada penyuluh pertanian yang masuk ke Desa Mata Allo, karena memang para penyuluh masuk bukan pada jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada memang pemberitahuan dari penyuluh sebelumnya ketika akan masuk desa, karena biasanya ketika akan diadakan kegiatan seperti penyuluhan pasti ada info sebelumnya, karena memang para penyuluh datang hanya melihat bagaimana perkembangan dari pertanian di sini dan sekedar bercerita lepas dan sharing dengan para petani saya rasa itulah kerjasama spontannya”.(hasil wawancara dengan SY 08 November 2018).

Berdasarkan keterangan SY di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para petani sering bertemu dengan para penyuluh secara kebetulan ketika penyuluh memasuki Desa Mata Allo. Pertemuan kedua belah pihak akan melahirkan kegiatan dalam kerjasama spontan seperti sharing antara penyuluh dengan petani langsung yang dimana pertemuannya tidak direncanakan sebelumnya antara kedua belah pihak dan tidak adanya perintah untuk melakukan pertemuan guna melakukan sharing tentang pertanian.

Berikut hasil wawancara dengan BT selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo;

“...para penyuluh pernah singgah di kebun ketika saya sedang panen, kita cuma cerita-cerita tentang pertanian dan masalah yang sedang saya alami dalam bertani, kita cuma tukar sedikit informasi mengenai pertanian, baik masalah yang saya sampaikan serta solusi yang diberikan dari para penyuluh tentang masalah saya pada saat itu”(hasil wawancara dengan BT 24 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari BT dapat diketahui bahwa kerjasama spontan yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam hal ini penyuluh

pertanian dan petani yaitu pertemuan yang tidak direncanakan dimana pertemuannya membahas tentang pertanian, baik itu masalah yang dihadapi petani dan perkembangan hasil pertanian dari petani. Dimana pertemuan secara kebetulan terjadi di kebun petani dan menghasilkan solusi kepada petani ketika ada masalah yang dihadapi dalam bertani.

Kemudian hasil wawancara dengan GR selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo. berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...saya rasa kerjasama spontan ketika pada saat kita bertemu secara kebetulan dengan petugas penyuluh dimanapun itu, kita pasti cerita-cerita tentang pertanian tentunya kita membahas masalah dan perkembangan pertanian kita, pada saat yang bersamaan kita bisa di berikan semacam arahan dari penyuluh tentang apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hambatan yang kita alami pada saat bertani”(hasil wawancara dengan GR 20 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari GR dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama spontan antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu dengan adanya pertemuan yang tidak direncanakan. Dalam artian pertemuan antara penyuluh dengan petani hanya sekedar bertemu tanpa adanya surat perintah dari atasan maupun panggilan khusus dari petani untuk melakukan pertemuan dengan penyuluh pertanian. Dengan adanya pertemuan yang secara kebetulan memberikan ruang kepada petani dan penyuluh untuk saling menukar informasi sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan.

Hasil wawancara dengan UR selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo mengatakan bahwa ;

“...penyuluh biasa masuk desa dan singgah di beberapa kebun yang dilewati , kita baru tau kalau ada penyuluh kalau mereka singgah

karena memang biasanya selalu ada informasi sebelum penyuluh masuk itupun kalau ada kegiatan pertanian yang akan dilaksanakan seperti pelatihan ataupun pendampingan ataupun pertemuan resmi dengan para penyuluh, biasanya kita mendapat sedikit pengetahuan tentang pertanian ketika kita bertemu di kebun ataupun ditempat lain dimana kita tidak sengaja bertemu”.(hasil wawancara dengan UR 22 November 2018).

Keterangan dari UR menegaskan bahwa kerjasama spontan antara pemerintah dengan petani yaitu melalui pertemuan yang tidak sengaja antara pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian, dalam pertemuan yang terjadi petani secara tidak langsung mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai pertanian. baik itu solusi dari masalah yang dihadapi. Begitupun sebaliknya pemerintah dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang dihadapi petani sehingga selanjutnya pemerintah sudah tidak asing lagi mengenai hambatan para petani dan perkembangan pertanian dari beberapa petani.

Kemudian hasil wawancara dengan BA selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo. berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...kita biasanya mendapat informasi dari penyuluh kalau akan ada penyuluh datang di desa baik itu dari dinas maupun penyuluh yang di tugaskan di Desa Mata Allo, kadang juga ada penyuluh datang tanpa sepengetahuan kita, namun kedatangannya tidak ada kegiatan resmi yang akan di adakan, cuma hanya sekedar datang melihat lihat, dan saling tukar informasi”.(hasil wawancara dengan BA 19 November 2018).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan BA dapat diketahui bahwa pertemuan yang tidak direncanakan antara pemerintah dalam hal ini petugas penyuluh pertanian merupakan salah satu bentuk kerjasama spontan antara pemerintah dengan kelompok tani. Dimana pertemuan yang terjadi antara pemerintah dengan petani bisa terjadi dimana saja, di kebun

maupun di tempat lain dapat melahirkan berupa solusi dan pendapatan informasi mengenai pertanian dari kedua belah pihak.

Begitu juga yang diungkapkan oleh MA selaku masyarakat petani di Desa Mata Allo. Berikut keterangan dari beliau;

“...biasanya ada petugas dari pertanian datang ke desa , mereka biasa ajak kita komunikasi baik mencari tahu bagaimana perkembangan pertanian maupun keluhan yang dialami ketika bertani, selain itu kita tentunya mendapat arahan berupa solusi untuk meminimalisir masalah yang kita hadapi dalam bertani”.(hasil wawancara dengan MA 05 Desember 2018).

Berdasarkan jawaban informan di atas dapat diketahui bahwa kerjasama spontan pemerintah dengan kelompok tani yaitu melalui pertemuan yang menghasilkan berupa informasi dari masing-masing kedua pihak. Pertemuan kedua belah pihak hanya merupakan pertemuan yang tidak sengaja, dalam artian pertemuan antara kedua belah pihak tidak berdasarkan atas perintah siapapun ataupun perjanjian dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama spontan antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu dengan adanya pertemuan yang terjadi antara pemerintah dengan petani. dimana pertemuan antara kedua belah pihak merupakan pertemuan yang tidak sengaja terjadi. Dalam artian tidak ada perintah maupun perjanjian antara kedua pihak untuk melakukan pertemuan antara pemerintah dengan kelompok tani, karena pertemuan itu bisa terjadi dimana saja. Adapun ketika kedua pihak bertemu bukan pada saat jadwal pertemuan yang memang telah ditentukan harinya oleh petani



yang biasa dilakukan sekali dalam sebulan. Adapun pertemuannya menghasilkan informasi-informasi yang dapat menambah pengetahuan kepada kedua belah pihak. Seperti solusi dari pemerintah yang diberikan kepada petani untuk meminimalisir keluhan yang dihadapi petani pada saat bertani. Begitupun sebaliknya pemerintah dapat mendapatkan informasi secara langsung dari petani mengenai masalah yang dihadapi oleh petani sehingga pemerintah tidak asing lagi dengan keluhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani.

## **2. Kerjasama langsung**

Kerjasama langsung (*directed cooperation*) adalah kerjasama yang dilakukan atas perintah atasan atau penguasa.

Berikut hasil wawancara dengan MH selaku sekretaris di Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang;

“...ada beberapa program yang kita buat, seperti penyuluhan pertanian dan pendampingan. Sasaran dari program tersebut pastinya kepada para petani, dan para penyuluhlah yang ada di beberapa tempat yang diperintahkan untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada para kelompok tani. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan penyuluhan para petani mampu mengatasi kendala yang mereka hadapi sehingga hasil produksi dapat meningkat dengan baik, dan sampai saat ini alhamdulillah produksi pertanian palawija meningkat dari tahun sebelumnya”.(hasil wawancara dengan MA 06 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama langsung pemerintah dengan kelompok tani yaitu melalui pelaksanaan program pemerintah yang dimana dalam pelaksanaan program tersebut dikerjakan oleh penyuluh pertanian yang sudah ditempatkan di beberapa desa. Pelaksanaan program seperti penyuluhan

dan pendampingan merupakan salah satu program dari pemerintah dalam upaya mengembangkan pertanian di Desa Mata Allo. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan penyuluhan, para petani mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan dengan adanya penyuluhan masyarakat bisa meningkatkan hasil produksinya di bidang palawija dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari NL selaku petugas penyuluh di Desa Mata Allo. Berikut kutipan hasil wawancara dengan NL selaku petugas penyuluh di Desa Mata Allo;

“...biasanya kita melakukan kegiatan sesuai dengan program dari Dinas, seperti memberikan penyuluhan, pendampingan kepada para petani dengan harapan petani mampu meningkatkan hasil produksinya, program lainnya juga cukup mendukung dalam pengembangan produksi palawija di Desa Mata Allo seperti program pemberian bantuan bibit unggul kepada para petani, sehingga dengan adanya bantuan bibit para petani telah meningkatkan hasil produksinya dengan luas panen yang bertambah dari tahun sebelumnya”. (hasil wawancara NL 01 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan palawija di Desa Mata Allo tercapai dengan adanya pelaksanaan kerjasama langsung antara pemerintah dengan kelompok tani melalui pelaksanaan penyuluhan dengan melibatkan penyuluh dan petani. Pelaksanaan program penyuluhan bermaksud untuk membantu petani dalam pengembangan pertanian palawija di Desa Mata Allo. Selain itu program pemberian bantuan bibit unggul palawija kepada para petani merupakan salah satu program dalam pengembangan palawija.

Begitu juga pernyataan dari SY selaku kepala desa di Desa Mata Allo. Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...kerjasamanya seperti, pelaksanaan penyuluhan, pendampingan dari petugas penyuluh pertanian, dan bantuan bibit dari dinas pertanian. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pastinya ditujukan kepada para petani sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan maupun pendampingan petani harus ikut serta sehingga tujuan dari pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuannya. Penyuluhan mendukung dalam peningkatan hasil produksi pertanian karena melalui penyuluhan masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana sebenarnya bertani yang baik”. (hasil wawancara dengan SY 08 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari SY di atas dapat diketahui bahwa kerjasama petani dengan pemerintah melalui pelaksanaan penyuluhan oleh pemerintah melalui petugas penyuluh pertanian di Desa Mata Allo. Adapun untuk mencapai tujuan dari penyuluhan maka partisipasi dari masyarakat petani harus ikut serta dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah sehingga terjalin kerjasama yang baik. kerjasama dengan masyarakat harus ada karena partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyuluhan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan menjadi salah satu pendukung dalam peningkatan hasil produksi palawija karena dengan penyuluhan masyarakat mampu memperbaiki kesalahan dalam bertani dan meningkatkan cara bertani yang baik.

Hasil wawancara dengan BT selaku pengurus kelompok tani mengatakan bahwa ;

“...kita bisa diperintahkan untuk melakukan pertemuan dengan kelompok tani ketika akan di adakan penyuluhan oleh penyuluh pertanian, apalagi kalau ada dari dinas yang akan hadir dalam penyuluhan. Selain itu biasa ada bantuan pupuk dari pemerintah yang dibagikan kepada para petani secara bergiliran”. (hasil wawancara dengan BT 24 November 2018).

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara dengan BT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok tani bekerjasama dengan pemerintah dengan mengikuti arahan dari penyuluh. Misalkan arahan untuk melakukan pertemuan dengan kelompok tani lainnya guna untuk menghadiri pelaksanaan penyuluhan yang dihadiri oleh penyuluh setempat ataupun penyuluhan yang juga dihadiri oleh dinas pertanian. Selain dari pelaksanaan penyuluhan pelaksanaan program lainnya seperti Pemberian bantuan pupuk kepada petani seara bergiliran.

Begitu juga yang diungkapkan oleh GR selaku pengurus kelompok tani. Berikut pernyataan beliau;

“...partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian memang harus baik agar apa yang menjadi program pemerintah seperti penyuluhan bisa berjalan dengan baik. Sebelum penyuluhan dilakukan biasanya kita mendapat perintah dari penyuluh pertanian untuk mengumpulkan anggota kelompok tani untuk meghadiri penyuluhan, bisa juga sebaliknya kita dari petani yang memanggil penyuluh untuk datang melakukan penyuluhan ketika kita mendapat masalah, saya ras itulah bentuk kerjsama langsung antara kita dengan pemerintah. Beruntung juga ada kerjasama antara petani dengan pemerintah karena dengan itu kita mampu memperbaiki kekeliruan pada saat bertani sehingga kita mampu meningkatkan hasil produksi kita”.(hasil wawancara dengan GR 20 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan GR dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama langsung antara pemerintah dengan kelompok tani dibuktikan dengan ikutsertanya masyarakat petani dalam pelaksanaan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah melalui penyuluh pertanian. Pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan agar para petani mampu mengembangkan pertanian khususnya petani di Desa Mata Allo. Partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan program pemerintah seperti penyuluhan merupakan bentuk kerjasama dari masyarakat kepada pemerintah.

Hasil wawancara dengan UR selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo mengatakan bahwa;

“...kalau menurut saya partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan program-program pemerintah, seperti menghadiri penyuluhan, mengaplikasikan apa yang didapatkan dari penyuluhan sudah merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan kelompok tani. Pemerintah memberikan penyuluhan dan petani sebagai sasaran penyuluhan ikut serta dalam pelaksanaannya”. (hasil wawancara dengan UR 22 November 2018).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama langsung antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu dalam pelaksanaan program pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pertanian membuat program penyuluhan dimana sasaran dari penyuluhan yaitu petani. partisipasi dari masyarakat petani merupakan salah satu hal yang dapat mendukung dalam tercapainya tujuan dari pelaksanaan program-program pemerintah.

Hasil wawancara dengan BA selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo;

“...penyuluh bisa menyuruh kami untuk melakukan pertemuan dengan kelompok tani lainnya ketika akan ada program yang akan dilakukan yang akan dihadiri oleh dinas ataupun tidak ada dari dinas, misalnya pelaksanaan penyuluhan, ataupun pembuatan trikokompos dengan itu kita suda bisa ”(hasil wawancara dengan BA 19 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dengan pelaksanaan program-program pemerintah. Dimana pelaksanaan program

pemerintah dalam pengembangan pertanian sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat petani. Pelaksanaan program pertanian seperti penyuluhan maupun program lainnya dari pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Kemudian hasil wawancara dengan MA selaku anggota kelompok tani di Desa Mata Allo, berikut pernyataan dari beliau;

“...setahu saya ada penyuluhan yang di berikan kepada petani, penyuluhan bisa diberikan ketika kita mengadakan pertemuan rutin yang memang diadakan sekali dalam sebulan. Namun bisa juga kita mendapat perintah untuk menghadiri penyuluhan, ataupun program lainnya seperti cara pembuatan pupuk organik, cara mengolah tanah yang di tentukan memang harinya dan tempatnya oleh pemerintah diluar dari pertemuan yang kita adakan sekali dalam sebulan. Dengan adanya pertemuan rutin sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bertani sehingga hasil pertanian meningkat”.( hasil wawancara denga MA 06 November 2018 ).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dari MA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada program pemerintah yang memang ditujukan kepada petani. Pelaksanaan program tersebut dipegang oleh penyuluh pertanian. Adapula partisipasi dari masyarakat petani yang menjadi pendukung dalam keberlangsungan pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah seperti penyuluhan memberikan solusi kepada para petani dalam menyelesaikan masalah dalam bertani sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian palawija di Desa Mata Allo.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama langsung antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu dengan melalui pelaksanaan program-program

pemerintah. Dalam pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan pertanian sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Mata Allo untuk mensukseskan program-program pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun program pemerintah dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut: Pelatihan dan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, bantuan bibit unggul komoditi unggulan palawija, bantuan pupuk kepada petani. Pelaksanaan kerjasama langsung melalui pelaksanaan program pemerintah telah mampu membantu masyarakat petani dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bertani sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya.

### **3. Kerjasama kontrak**

Kerjasama kontrak adalah kerjasama yang dilakukan atas dasar tertentu atau adanya perjanjian antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Perjanjian yang disepakati oleh pihak yang melakukan kerjasama menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Pihak yang terlibat dalam kontrak kerjasama tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak karena adanya perjanjian yang sudah disepakati untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama.

Hasil wawancara dengan MH selaku Sekretaris Dinas Pertanian kabupaten Enrekang bahwa:

“...Tidak ada perjanjian tertulis yang kita sepakati dengan para petani untuk menjadi acuan maupun pedoman dalam pelaksanaan

kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo. Masyarakat juga biasanya ”. (Hasil wawancara dengan MA 06 November 2014).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan di atas bahwa tidak ada kerjasama kontrak yang dijalin antara pemerintah dengan kelompok tani karena tidak ada perjanjian yang disepakati sebelumnya, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Begitu juga yang dikemukakan oleh NL selaku petugas penyuluh pertanian di Desa Mata Allo. Berikut pernyataannya;

“...Tidak ada kontrak kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani yang ada di sana, sehingga tidak ada yang mengikat kita dalam proses pelaksanaan kerjasama ” (hasil wawancara dengan NL 01 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan NL dapat kita ketahui bahwa memang tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo yang didasari atas perjanjian tertentu , baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.

Hasil wawancara dengan SY selaku kepala Desa Mata Allo mengatakan bahwa;

“...dalam pelaksanaan kerjasama sampai saat ini tidak ada kontrak kerjasama yang disepakati dengan kelompok tani dalam mendukung perkembangan pertanian di Desa” (hasil wawancara dengan SY 08 November 2018)

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kerjasama yang di jalankan berdasarkan kontrak ataupun perjanjian dari kedua belah pihak yang bekerjasama. Hal yang sama diungkapkan oleh BT selaku pengurus dari kelompok tani. Berikut hasil wawancara dengan beliau;



“...yang saya ketahui memang tidak ada kerjasama yang kita jalankan berdasarkan kontrak yang kita sepakati dengan pemerintah. Dalam artian tidak ada perjanjian yang kita buat bersama pemerintah”. (hasil wawancara dengan BT 24 November 2018).

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan pertanian di Desa Mata Allo , antara pemerintah dengan kelompok tani tidak memiliki pedoman khusus ataupun ketentuan dasar dalam pelaksanaan kerjasama untuk mengembangkan pertanian.

Selanjutnya hasil wawancara dengan GR selaku pengurus dari kelompok tani. Berikut pernyataannya;

“...pelaksanaan kerjasama antara kita dengan pemerintah itu tidak atas dasar kontrak kerjasama, tidak ada semacam perjanjian yang kita buat dengan pemerintah, kita hanya mengikuti program pemerintah yang menyangkut dengan pertanian seperti, penyuluhan selain itu, kita melakukan pertemuan rutin dengan anggota kelompok tani lainnya yang dilakukan sebulan sekali”.(hasil wawancara dengan GR 20 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kontrak kerjasama yang dijalin antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang. Kelompok tani hanya mengikuti berbagai program pemerintah yang dianggap dapat mendukung perkembangan pertanian. Selain itu kelompok tani mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Masyarakat petani memang seharusnya ikut berpartisipasi dalam program pemerintah guna memaksimalkan tujuan dari program-program

pemerintah yang menyinggung tentang pertanian yang memang ditujukan kepada petani.

Berdasarkan keterangan informan di atas selanjutnya didukung oleh pernyataan UR. Berikut hasil wawancara dengan UR selaku pengurus kelompok tani;

“...kita menjalin kerjasama dengan pemerintah namun kalau perjanjian yang mengikat itu tidak ada dalam proses pelaksanaan kerjasamanya kita”. (hasil wawancara dengan UR 22 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani dijelaskan bahwa kelompok tani melakukan kerjasama dengan pemerintah namun, tidak menjalin kerjasama dalam bentuk kontrak karena tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan kelompok tani dalam proses kerjasama. Begitu juga yang diungkapkan oleh BA selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo. Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...sepengetahuan saya tidak ada kontrak kerjasama antara petani dengan pemerintah, kalau ada kontrak berarti ada perjanjian maupun ketentuan yang kita sepakati bersama baik dari pemerintah maupun dari kelompok tani, tapi memang tidak ada hal seperti itu, biasanya kita cuma mengikuti kegiatan yang diadakan penyuluh seperti penyuluhan pertanian”. (hasil wawancara dengan BA 19 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perjanjian bersama antara kedua pihak yang bekerjasama, dalam hal ini pemerintah dengan kelompok tani. Dalam artian tidak ada kerjasama kontrak yang dijalin oleh pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo.

Hasil wawancara dengan MA selaku masyarakat petani di Desa Mata Allo. Berikut pernyataan dari beliau;

“...tidak ada kontrak. Perjanjian juga tidak ada. Kontrak kerjasama dengan pemerintah memang tidak ada”(hasil wawancara dengan MA 05 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA diketahui bahwa memang tidak ada kontrak kerjasama yang dijalin antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo. Dilihat dari tidak ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Sesuai hasil wawancara diatas dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelaksanaan proses kerjasama dalam bentuk kerjasama kontrak antara pemerintah dengan kelompok tani dalam mengembangkan pertanian di Desa Mata Allo, dalam artian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo dalam pengembangan pertanian tidak didasari oleh perjanjian ataupun kesepakatan bersama sehingga tidak ada sesuatu yang mengikat antara pemerintah dengan kelompok tani karena tidak adanya kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.

#### **4. Kerjasama Tradisional**

Kerjasama tradisional adalah kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan kelompok tani sebagai unsur dari sistem sosial. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kerjasama tradisional tentunya terdiri dari kegiatan-kegiatan dari sistem sosial yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bekerjasama dalam hal ini pihak pemerintah dengan

kelompok tani di Desa Mata Allo. Berikut hasil wawancara dengan MH selaku sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang;

“...kalau masalah kerjasama tradisional yah seperti kerjabakti ataupun gotongroyong dalam pembangunan jalan tani, pembuatan embung-embung juga bisa. Pembuatan embung-embung diharapkan dapat membantu petani untuk mengatasi masalah pada ketersediaan air, sehingga hasil produksi tidak menurun”. (hasil wawancara dengan MH 06 November 2018 ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu dengan pelaksanaan kerjabakti dengan masyarakat khususnya dengan para petani dalam pembangunan sarana prasarana pertanian seperti pelaksanaan kerjabakti atau gotongroyong dalam pembangunan jalan tani, dan pembangunan embung-embung.

Pernyataan dari MA di atas di dukung oleh keterangan dari NL selaku penyuluh pertanian di Desa Mata Allo. Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...kalau dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti pembuatan jalan tani maupun pembangunan penampung air pasti kita melaksanakan kerja bakti dengan masyarakat, bukan cuma masyarakat sih, para aparat desa juga ikut dalam kerjabakti ketika ada pembangunan khusus pertanian yang dilaksanakan di Desa Mata Allo”. (hasil wawancara dengan NL 01 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari NL dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kerjasama tradisional pemerintah dengan kelompok tani yaitu dengan pelaksanaan kerjabakti dalam proses pembangunan jalan tani dan pembangunan lainnya yang terkait dengan pertanian seperti pembangunan penampungan air.

Hasil wawancara dengan SY selaku Kepala Desa Mata Allo.

berikut hasil wawancara dengan beliau ;

“...kerjasama tradisionalnya seperti gotongroyong ataupun kerjabakti, baik itu pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam bertani”(hasil wawancara dengan SY 08 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gotongroyong atau kerjabakti dalam pembangunan sarana dan prasarana merupakan bentuk pelaksanaan kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani.

Hasil wawancara dengan BT selaku pengurus kelompok tani.

Berikut hasil wawancara dengan beliau ;

“...biasanya dilakukan kerjabakti atau gotongroyong ketika dilakukan pembangunan, misalnya kerjabakti dalam pembangunan jalan tani”. (hasil wawancara dengan BT 24 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjabakti dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani merupakan salah satu kegiatan kerjasama tradisional pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian di Desa Mata Allo.

Hasil wawancara dengan GR selaku pengurus kelompok tani.

Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...menurut saya pelaksanaan kerjabakti sudah merupakan kerjasama tradisional yang kita lakukan, dalam pembuatan jalan pertanian maupun pembuatan tampungan air kita biasanya kerja bersama dalam menyelesaikannya”.(hasil wawancara dengan GR 20 November 2018).

Berdasarkan keterangan dari GR di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani

yaitu dengan pelaksanaan kerjabakti dalam pembuatan tampungan air dan pembangunan jalan tani.

Hasil wawancara dengan UR selaku pengurus kelompok tani.

Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“...kalau kerjasama tradisionalnya seperti ikut kerjabakti dalam pembangunan, baik itu pembangunan sarana prasarana seperti jalanan”.(hasil wawancara dengan UR 22 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan UR dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tradisionalnya yaitu keikutsertaan petani dalam pembangunan sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan jalan tani.

Berikut hasil wawancara dengan BA selaku pengurus kelompok tani ;

“...kerjasama tradisionalnya itu seperti gotongroyong dalam proses pembangunan embung-embung”(hasil wawancara dengan BA 19 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BA dapat diketahui bahwa gotongroyong dalam pembangunan embung-embung merupakan salah satu kegiatan kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo.

Hasil wawancara dengan MA selaku masyarakat petani mengatakan bahwa;

“...kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani itu dalam bentuk kerjasama seperti gotong royong dalam pembuatan jalan para petani. Adanya jalan tani membuat kita lebih gampang untuk menjangkau lokasi pertanian palawija” (hasil wawancara dengan MA 05 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama dalam bentuk tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu pelaksanaan gotongroyong dalam pembangunan jalan pertanian di Desa Mata Allo.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tradisional antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo yaitu dengan kegiatan gotongroyong dan kerjabakti dalam pembangunan jalan tani dan pembangunan embung-embung atau penampungan air. Pelaksanaan proses pembangunan melibatkan masyarakat khususnya masyarakat petani dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan tani, dan pembuatan penampungan air telah membantu para petani dalam menyelesaikan permasalahan seperti jalan yang susah dijangkau oleh petani dan penyuluh sekarang sudah bisa dijangkau dengan cukup baik bahkan lokasi pertanian palawija sudah bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua. Adapun pembangunan embung-embung membuat petani dapat menyelesaikan masalah pada ketersediaan air, sehingga penurunan jumlah produksi dapat diminimalisir.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang telah tercapai pengembangan palawija di Desa Mata Allo.

### **C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang**

Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama pemerintah dan kelompok tani. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat jalannya kerjasama pemerintah dengan kelompok tani.

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yaitu segala sesuatu yang dapat mempermudah proses pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal ini kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija. Dalam artian faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani sehingga kerjasama dapat berjalan secara maksimal.

##### **a. Saling percaya**

Dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian harus saling mempercayai antara pemerintah dengan kelompok tani, sehingga dalam pelaksanaan kerjasama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan NL selaku petugas penyuluh di Desa Mata Allo;

“...Sebenarnya salah satu faktor pendukung dalam melakukan kerjasama yaitu adanya saling mempercayai baik itu dari pemerintah kepada kelompok tani maupun sebaliknya. Sehingga dalam kerjasama yang kita jalani itu tidak ada yang merasa dirugikan dan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai”. (Hasil wawancara dengan NL 01 November 2018 ).



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama yang dijalin antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo dalam pengembangan pertanian salah satu faktor pendorong atau penunjang keberhasilannya yaitu adanya kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani maupun sebaliknya.

Kerjasama yang kohesif dan solid hanya bisa terbangun pada kondisi dimana para aktor saling percaya. Kepercayaan tersebut tidak hanya timbul karena kebutuhan, melainkan diperlukan sejumlah informasi untuk menyakinkan para pihak terhadap calon mitranya masing-masing. Dalam kaitan ini, maka profil tokoh atau institusi yang akan masuk ke dalam kemitraan dapat membantu menjelaskan informasi yang dibutuhkan tersebut (Mustafa, 2017: 50)

#### b. Sarana dan prasarana

Berikut hasil kutipan wawancara dengan NL selaku petugas penyuluh di Desa Mata Allo;

“...Tentunya ada faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, seperti dana yang cukup dalam pembiayaan operasional serta sarana dan prasarana yang cukup pada saat kita melakukan penyuluhan. Selain itu Desa Mata Allo cukup gampang untuk dijangkau karena jalanan menuju desa cukup baik”. (Hasil wawancara dengan NL 01 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa dukungan dana, sarana dan prasarana serta lokasi desa yang mudah di jangkau merupakan salah satu penunjang bagi pemerintah dalam kegiatan kerjasama dengan kelompok tani di Desa Mata Allo. Dengan adanya

dukungan dana, sarana dan prasarana serta lokasi yang strategis cukup membantu pemerintah dalam hal ini petugas penyuluh dalam memberikan penyuluhan kepada petani di Desa Mata Allo.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo yaitu dengan adanya kepercayaan yang ditanamkan oleh pemerintah kepada para petani dan begitupun sebaliknya, selain itu adapun faktor lainnya yaitu dana, sarana dan prasarana dan yang cukup baik sehingga mendukung bag pemerintah dan kelompok tani dalam pelaksanaan kerjasama.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal ini hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo yaitu antara lain:

### a. Tidak ada kontrak kerjasama

Berikut hasil kutipan wawancara dengan NL selaku petugas penyuluh di Desa Mata Allo ;

“...Tidak ada perjanjian ataupun aturan yang kita sepakati bersama dalam kerjasama, baik dari pemerintah dan kelompok tani yang ada di sana. Kita hanya menjalankan program pemerintah seperti program penyuluhan dan pembinaan”. (Hasil wawancara dengan NL 01 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo yaitu tidak adanya kontrak kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo, dalam artian tidak ada aturan dan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang bekerjasama baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Hal yang serupa diungkapkan oleh BT selaku anggota kelompok tani. Berikut pernyataannya ;

“yang saya ketahui tidak ada kontrak kerjasama yang ada, semacam perjanjian ataupun aturan yang kita sepakati pun tidak ada” (Hasil wawancara dengan BT 24 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa tidak ada kontrak kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo. Hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah dengan kelompok tani karena tidak ada aturan yang mengikat antara pemerintah dengan kelompok tani dalam melakukan kerjasama demi kepentingan bersama.

b. Kurangnya partisipasi dari beberapa kelompok tani

Dalam keberhasilan pengembangan pertanian, bukan hanya pemerintah yang memegang peran dalam keberhasilan perkembangan tersebut. Namun, partisipasi kelompok tani selaku aktor utama dari pertanian juga sangat berperan dalam keberhasilan perkembangan pertanian karena petanilah yang secara langsung mengetahui apa saja permasalahan yang mereka alami.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan MH selaku sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang ;

“...kalau soal partisipasi petani di Kabupaten Enrekang itu Alhamdulillah, menurut saya itu luarbiasa tinggi partisipasinya dibuktikan dengan selama ini Enrekang dikenal sebagai penghasil pertanian, hampir semua komoditi yang dominan itu hortikultura dan perkebunan dan ketahanan pangan . Tapi harus juga diakui bahwa ada saja petani yang masih kurang berpartisipasi dalam keberhasilan program pemerintah”.(Hasil wawancara dengan MH 06 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi dari kelompok tani masih kurang maksimal. Dilihat dari masih ada kelompok tani yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Hal yang serupa di ungkapkan oleh NL selaku petugas penyuluh pertanian di Desa Mata Allo. berikut pernyataannya;

“...partisipasi kelompok tani dalam program penyuluhan dan pembinaan yang diadakan pemerintah cukup baik. Namun yang cukup baik partisipasinya itu cuma dua kelompok tani dari sembilan kelompok tani yang ada di sana, yaitu kelompok tani AL-Mubarak dan kelompok tani Salubendo. Kedua kelompok tani ini masih aktif dalam melakukan pertemuan rutin yang diadakan sekali dalam sebulan. Lain halnya dengan tujuh kelompok tani yang memang sudah jarang melakukan pertemuan rutin yang diadakan sekali dalam sebulan”(Hasil wawancara dengan NL 01 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo yaitu kurangnya partisipasi masyarakat petani. Terhitung dari sembilan kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo hanya ada dua kelompok tani yang cukup berpartisipasi dari program

penyuluhan dan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu kelompok tani Al-Mubarak dan kelompok tani Salubendo.

Berikut hasil wawancara dengan BT selaku pengurus kelompok tani di Desa Mata Allo. berikut pernyataan beliau :

“ada memang beberapa kelompok yang cukup aktif dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, namun ada pula yang tidak aktif bahkan kelompok taninya hanya tinggal nama tanpa adanya partisipasi, hal tersebut dikarenakan karena kurangnya komunikasi yang dijalin dengan pemerintah karena sibuk sendiri mengurus pertanian dan bertani semampu mereka”.(hasil wawancara dengan BT 24 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BT dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya komunikasi yang dijalin oleh beberapa anggota kelompok tani yang bertani sesuai dengan keinginan mereka merupakan penyebab dari kurangnya partisipasi dari beberapa kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan kelompok tani yaitu tidak adanya kontrak kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani sehingga tidak ada aturan yang menjadi acuan untuk melakukan kerjasama terkait dengan pertanian. Adapun faktor penghambat lainnya yaitu kurang berpartisipasinya beberapa kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo dalam pelaksanaan program pemerintah terkait dengan pertanian. Dilihat dari sembilan kelompok tani yang ada di Desa hanya ada dua kelompok tani yang cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan penjelasan mengenai kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan Palawija di Desa Mata Allo kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah berjalan atau terlaksana cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah hasil produksi yang terus eningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui beberapa bentuk kerjasama yaitu a). Kerjasama spontan kegiatannya berupa pertemuan yang terjadi secara kebetulan yang akan menimbulkan interaksi antara kedua pihak. Sehingga dengan pelaksanaan kerjasama spontan pemerintah dan petani dapat saling berbagi informasi terkait dengan perkembangan palawija. b). Kerjasama langsung, yaitu pelaksanaan kerjasama dengan melaksanakan program-program pemerintah mengenai pertanian, seperti penyuluhan pertanian, pendampingan dan penyampaian informasi, pemberian bantuan pupuk, serta bantuan bibit unggul palawija kepada petani. Melalui pelaksanaan program pemerintah petani mampu meningkatkan hasil produksinya melalui solusi cerdas dari pemerintah dalam menghadapi masalah pertanian. c). Kerjasama tradisional yaitu pelaksanaan gotong royong pembangunan sarana dan prasarana pertanian, seperti pembangunan jalan tani dan pembangunan embung-embung

serta penyediaan teknologi pertanian.

Faktor yang mempengaruhi kerjasama yaitu faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu saling percaya serta sarana dan prasarana yang cukup baik mengenai kerjasama. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya kontrak kerjasama antara pemerintah dengan kelompok tani mengenai pertanian dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo. Selain itu kurangnya partisipasi dari beberapa kelompok tani yang ada di Desa Mata Allo. Kedua faktor tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam berlangsungnya kerjasama dalam proses pembangunan pertanian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka adapun saran dan masukan yang diberikan adalah sebagai berikut;

Pelaksanaan pengembangan palawija bisa diwujudkan dengan pelaksanaan kerjasama atas dasar kontrak yang disepakati antara pemerintah dengan kelompok tani, diharapkan antara pemerintah dengan kelompok tani melakukan kerjasama kontrak dalam pelaksanaan pengembangan palawija sehingga pengembangan palawija dapat terlaksana dengan baik. Karena dengan adanya kontrak maka akan ada yang mengikat antara pemerintah dengan kelompok tani sehingga tidak ada pihak yang acuh dalam pelaksanaan kerjasam demi pengembangan palawija di Desa Mata Allo.

Pihak pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan lagi para kelompok tani khususnya kepada kelompok yang kurang berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah seperti pengadaan penyuluhan secara

berkala kepada petani, pengadaan depot pupuk dan sosialisasi yang cukup kepada petani agar apa yang menjadi fungsi dari pemerintah maupun kelompok tani dapat berjalan dengan semestinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kerjasama.

Diharapkan kepada masyarakat petani setempat agar meningkatkan perhatian terhadap pentingnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dari program pemerintah dapat tercapai dengan semestinya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Anjuwaningsih, 2006, *Penerapan Kerjasama*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- . 2011. *Sosiologi Komunikasi (teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasind masyarakat)*. Jakarta: Kencana.
- . 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik (Peduli, Inklusif dan Kolaborasi)*. Yogyakarta: Gadjadara Universitas Press.
- Kaswan. 2013. *Leadership and Teamworking*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Baswori. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulum, Ihyaul, Ahmad Juanda. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, 2009, *Pengertian Kerjasama*, Jakarta. PT. Bina Rena Pariwisata
- Sumber Lain :
- Caesar Muh, 2016, *Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Jenudin. 2017. *Peranan Kelompok Tani Sumber Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani Sumber Harapan Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.*
- Matanari, Danile, dkk. 2016. *Peranan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Produksi Padi Sawah (Oriza Sativa) di Desa Hitagugung Kecamatan Sumbul Kabupaen Dairi.*
- Saldiatul, 2016, *Kerjasama Lembaga Adat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Mappugau Sihanua Di Kabupaten Sinjai ,* Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Silaban, Liskan Rosda dan Sugiharto. 2016. *Usaha Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Pertanian.*
- Sofiyana, Roudlotul Jannah. 2013. *Interaksi Sosial Masyarakat dengan Waria di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin Kamis.*
- Sumarni, Ester, dkk. 2016. *Interaksi Sosial Kerjasama Masyarakat Multietnis (Dayak, Madura, Melayu) Di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam.*
- Sumilat, Daisy, dkk. 2017. *Administrasi Kelompok Tani di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

L

A

M

P

I

R

A

N

## DOKUMENTASI







*Data Kelompok Sim Uda Tan.*

No	Nama desa	Nama Poktan	Nama Ketua	Alamat Sekretariat	Jumlah Anggota (input online)	Jumlah Anggota (upload excel)
1	Mata Allo	Al - Mubaraq	Geri	To Enduk	23	0
2	Mata Allo	Buangin	Syaripuddin	To Cemba	0	0
3	Mata Allo	Buntu Bunq	Baharuddin. B	To' Enduk	8	0
4	Mata Allo	KWT.SINAR BT. KURUNG	HATINA	TO,COLLO	21	0
5	Mata Allo	Mata Wai Cambae	Hamzah D.	To Enduk	25	0
6	Mata Allo	Pantilang	Ningki	To' Cemba	27	0
7	Mata Allo	SALU BENDO	USMAN RASI	Dusun To' Collo, Desa Mata Allo	19	0
8	Mata Allo	Sinar Bunbu Kurung	Sukri A	To' Collo	19	0
9	Mata Allo	Tunas Muda	Sinarto	To' Enduk	24	0



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588



Nomor : 1685/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Emiyanti B  
Stambuk : 10561 04975 14  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang  
Judul Skripsi : **"Kerjasama Pemeintah dengan Kelompok Tani dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang"**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 15 Oktober 2018

Dekan,  
Uk. Wakil Dekan I



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM: 1084 366





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

**ENREKANG**

Enrekang, 24 Oktober 2018

Nomor : 569/DPMPTSP/IP/X/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian  
Kab. Enrekang  
2. Kepala BP2K Kec. Alla  
3. Kepala Desa Mata Allo  
Masing-masing  
Di

Tempat

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 94/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018 Tanggal 16 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : **Emiyanti B.**  
Tempat Tanggal Lahir : To'cempa, 17 Desember 1997  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : To'enduk, Desa Mata Allo Kec. Alla

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 24 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG  
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



**HARWAN SAWATI, SE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang ( Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Alla.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang bersangkutan (**Emiyanti B.**).
07. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
DINAS PERTANIAN**

Alamat : Jln. Poros Enrekang - Rappang Km. 3 Telp (0420) 21192 Fax (0420) 21099  
Websit : [www.distan.enrekangkab.go.id](http://www.distan.enrekangkab.go.id) Email : [distanbunekg@gmail.com](mailto:distanbunekg@gmail.com)  
ENREKANG 91712

**SURAT KETERANGAN**

No. 520/859/xi/DISTAN/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Ir. Muhammad Arief, M. Si  
b. NIP : 196412311989031226  
c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)  
d. Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kab. Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : Emiyanti B  
b. Tempat Tgl Lahir : To'Cemba, 17 Desember 2018  
d. Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
e. Alamat : To'Enduk, Desa Mata Allo Kec. Alla

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Dinas Pertanian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Kerjasama Pemerintah dengan Kelompok Tani dalam Pengembangan Palawija di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 06 November 2018

a.n. Kepala Dinas  
Sekretaris

**Ir. Muhammad Arief, M. Si**  
NIP. 196412311989031226



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN ALLA  
DESA MATA ALLO

Alamat : JALAN POROS KALOSI - TO'CEMBA, NO.36 Tlp/HP. 081241397678

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 396/DMA/KA/XII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ASPAN HUSAIN, S.Kom  
Jabatan : Sekretaris Desa Mata Allo  
Alamat : Dusun To'enduk, Desa Mata Allo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : EMIYANTI B  
N I M (STAMBUK) : 105610497514  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Yang bersangkutan tersebut benar-benar telah mengadakan Penelitian di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**" KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI DALAM PENGEMBANGAN PALAWIJA DI DESA MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

To'cemba, 9 November 2018  
a.n. KEPALA DESA MATA ALLO  
Sekretaris,



**ASPAN HUSAIN, S.Kom**

## RIWAYAT HIDUP



**Emiyanti. B** adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Dahlini sebagai anak pertama dari dua bersaudara, penulis dilahirkan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Desember 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 90 To'Cemba (lulus tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 3 Alla (lulus tahun 2011) dan SMAN 1 Alla dan selama menjadi siswi, penulis bergabung di organisasi PMR selama 2 Tahun (lulus tahun 2014), dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selama penulis menjadi mahasiswa, penulis sempat bergabung dalam Organisasi Daerah yaitu Mahasiswa Sosiologi Massenrempulu(MASSAMPU) serta Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu.